

# PROCEEDING

## Business Conference "BISNIS DAN ISU-ISU GLOBAL"

6 Desember 2012



Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Yogyakarta

ISBN 978-602-17067-0-1



**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : PROSIDING NASIONAL**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : PEOPLE EMPOWERING: SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL (STUDI PADA MASYARAKAT PERBATASAN)

Penulis Prosiding : Istiana Rahatmawati dan Purbudi Wahyuni

Identitas Prosiding : a. Nama Prosiding : Business Conference "BISNIS DAN ISU-ISU GLOBAL"

b. Pelaksanaan : 2012

c. Penyelenggara : FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

d. url dokumen : <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/23399>

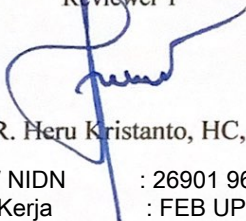
Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding ...		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Prosiding (10%)		0,2	0,1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		0,6	0,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		0,6	0,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		0,6	0,5
<b>Total = (100%)</b>		<b>2</b>	<b>1,5</b>
<b>Kontribusi Pengusul</b> 40%			
<b>Komentar Peer Review</b>	<p>1. Tentang kelengkapan unsur isi Prosiding  <i>unsur prosiding cukup lengkap</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  <i>pembahasan cukup mendalam</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

	..... 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi <i>metodologi data/informasi cukup mutakhir</i> ..... ..... ..... 4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>penerbit dr UPN</i> ..... ..... .....
--	---

Yogyakarta, 10 Februari 2021

Reviewer 1



(Dr. R. Heru Kristanto, HC, M.Si)

NIK / NIDN : 26901 960132 1  
Unit Kerja : FEB UPN "Veteran" Yogyakarta  
Jabatan / Pangkat : Lektor Kepala / Penata Tingkat 1



**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : PROSIDING NASIONAL**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : PEOPLE EMPOWERING: SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL (STUDI PADA MASYARAKAT PERBATASAN)

Penulis Prosiding : Istiana Rahatmawati dan Purbudi Wahyuni

Identitas Prosiding : a. Nama Prosiding : Business Conference "BISNIS DAN ISU-ISU GLOBAL"

b. Pelaksanaan : 2012

c. Penyelenggara : FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

d. url dokumen : <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/23399>

Hasil Penilaian Peer Review :

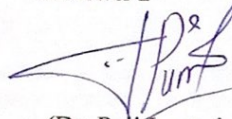
Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding ...		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Prosiding (10%)		0,2	0,2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		0,6	0,6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		0,6	0,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		0,6	0,6
<b>Total = (100%)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Kontribusi Pengusul</b> 40%			
<b>Komentar Peer Review</b>	<p>1. Tentang kelengkapan unsur isi Prosiding  <i>Isi prosiding lengkap, ada abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan pembahasan, penutup dan daftar pustaka.</i></p> <p>2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan  <i>Ruang lingkup sesuai bidang Ilmu Ekonomi. pembahasan mendalam tapi belum banyak referensi jurnal.</i></p> <p>3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi  <i>Data mutakhir (10 th terakhir)</i></p>		

4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit

penerbit FISIP UPN "Veteran"  
Yogyakarta

Yogyakarta, 10 Febuari 2021

Reviewer 2



(Dr. Puji Lestari, M.Si.)

NIK / NIDN : 0525067001

Unit Kerja : FEB UPN "Veteran" Yogyakarta

Jabatan / Pangkat : Lektor Kepala IVa

**PEOPLE EMPOWERING: SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN  
KETAHANAN EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL  
(STUDI PADA MASYARAKAT PERBATASAN)**

**Istiana Rahatmawati dan Purbudi Wahyuni**  
**Program Studi Manajemen, FE, UPN "Veteran" Yogyakarta**  
**Jl. SWK. 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta, 55283**  
Email: [rahatmawati@yahoo.com](mailto:rahatmawati@yahoo.com)

**Abstract**

Independence of Indonesia based on Nationalism Doctrine and Democracy Doctrine (Sovereign People) which is as the basic of the political economic conception that based on Economic Democracy as the order of Pasal 33 of UUD 1945. Democracy means people's interests is prior rather than personal interests. Does the people who lived in the border of the state face this conception in reality? The data collected from in-depth interview and Focus Group Discussion of people in the border Indonesia - Malaysia, in Entikong village, Entikong District, Sanggau Regency, Kalimantan Barat (West Borneo) Province, Republic of Indonesia. In-depth interview and Focus Group Discussion held to Primary schools teachers and informal leaders in the communities, hoping they will be able to be agents of transfer of knowledge. The result of this research is that the people of entikong might says " Malaysia in stomach but Indonesia in heart". This idiom indicate that the attention of Indonesia's Government is minime to this area, both physically needs and basic needs of life. Until today people in the border side in Indonesia was looking for living and was feeding by the facilitation to fillfuling their basic needs from neighbour state, Malaysia. It's not good indeed, but we still have chance since the people's in this border state still have nationalism values. So, there are the possibility that National Resilience still excists in this area. Based on this results, we do hope that these informations can be used for finding solutions via transfer of knowledge to create people empowered. By strengthening economy step by step economic progress will be occure and it will be give an impact to the progress of National Resilience.

***Keyword: people empowering, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Nasional, agen transfer of knowledge***

**A. Pendahuluan**

Ilmu Ekonomi sebenarnya berakar pada Nasionalisme, aspirasi Negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa dari pada sekedar untuk makan ( Robinson, 1962 dalam Swasono, 2011). Indonesia Merdeka berdasarkan pada doktrin Kebangsaan (Nasionalisme) dan doktrin Kerakyatan (Rakyat Berdaulat), sebagai dasar lahirnya konsepsi politik ekonomi yang mendasarkan pada Demokrasi Ekonomi yang didasari oleh UUD '45 pasal 33. Dalam



demokrasi ini kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-perorang. Demikian halnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang berada di kawasan ASEAN, harus tunduk dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan Negara-negara ASEAN. ASEAN CHARTER (Piagam ASEAN) yang telah ditanda tangani oleh semua kepala Negara ASEAN termasuk Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2007 pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapore harus menjadi landasan hukum ASEAN dalam melaksanakan semua kegiatannya yang berorientasi terhadap kepentingan rakyat termasuk masyarakat di perbatasan Negara. Sejumlah poin penting dari Piagam ASEAN yang terdiri dari 13 bab dan 55 pasal itu adalah menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di kawasan, membentuk pasar tunggal berbasis produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi, memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yg baik, serta menegakkan aturan hukum dan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait dengan itu, ASEAN akan membentuk badan HAM yg mekanismenya ditetapkan oleh para Menteri Luar Negeri. Forum ini dapat menjadi alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berada pada posisi silang dunia berbatasan dengan Negara tetangga, baik yang berupa batas laut maupun batas darat. Batas darat terpanjang berada di antara Indonesia dengan Malaysia. Dinyatakan bahwa Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia terpanjang terdapat di Kalimantan dengan panjang batas sekitar 2000 km, membentang dari Tanjung Datu (lihat peta) di sebelah barat hingga ke pantai timur Pulau Sebatik di sebelah timur. Penentuan batas darat

dimaksud merujuk pada kesepakatan antara Hindia-Belanda dengan Inggris pada th 1891, 1915 dan 1925. Program penegasan batas (demarkasi) secara bersama dimulai pada tahun 1973, dan hingga saat ini telah terpasang sebanyak 19.000 lebih patok batas. Secara delimitasi dapat dikatakan batas darat, yang sebagian besarnya berupa *watershed* (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini sudah selesai. Soebar Sutisna & Kusumo Widodo (2010).

Berbagai studi menunjukkan bahwa isu tentang perbatasan sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah ini dapat diidentifikasi berdasar beberapa kelompok *issue*, (Depkimpraswil, 2002; BAPPENAS 2004; LEMHANNAS, 2004; dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yaitu sebagai berikut:

1. Isu geografis-teritorial karena belum disepakatinya batas-batas wilayah darat maupun laut di beberapa tapal batas dengan Negara tetangga.
2. Isu-isu keamanan dan kedaulatan nasional, terutama kejahatan lintas batas (*cross border crimes*) yang terorganisir seperti penyelundupan, perdagangan illegal (obat, manusia, bahan2 makanan, kayu dll) dan garis batas (*dispute area*) yang kabur dengan akibat berkurangnya wilayah nasional Indonesia.
3. Isu lingkungan yakni kerusakan ekologi dan eksploitasi sumberdaya berlebihan, bersifat lintas batas dan dilakukan secara legal maupun *illegal* (mis: *illegal logging*). Potensi Sumberdaya Alam yang melimpah belum mampu memberikan nilai tambah yang besar dan pusat pelestarian lingkungan belum berkembang.
4. Isu kemiskinan, keterbelakangan, keterbatasan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami WNI di perbatasan membuat terjadinya perdagangan



manusia. Sarana transportasi dan pembangunan yang masih minim, infra struktur yang terbatas.

5. Isu koordinasi dan implementasi kebijakan pembangunan akibat jauhnya jarak komunikasi antara pemerintah lokal dan pemerintah daerah/pusat. Rendahnya alokasi dana pembangunan/ ketergantungan pada pemerintah pusat dan belum terwujudnya keterpaduan dalam upaya pengelolaan perbatasan. Pembangunan hanya diarahkan pada pusat-pusat kota/ pertumbuhan. Masih minimnya pelayanan CIQS pada pintu-pintu lintas batas.
6. Isu kependudukan dan perubahan sosial terutama akibat migrasi lintas batas yg bersifat legal dan illegal.
7. Isu Patriotisme dan Ketahanan Nasional terutama menyangkut persepsi penduduk perbatasan bahwa mereka di"anak tiri"kan.

Atas dasar ke-tujuh *issue* perbatasan Negara, perlu kiranya untuk segera mencari solusi. Salah satu *issue* utama atau *issue* mendasar yaitu *issue* tentang kemiskinan (*issue* ke-4) yaitu tentang kemiskinan. Perilaku masyarakat akan berdampak atau membias pada 6 (enam) *issue* yang lain. Masyarakat yang miskin akan mudah tergoyah rasa nasionalismenya, demi pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak (untuk bertahan hidup). Untuk itu perlu dilakukan penelitian agar diketahui perilaku masyarakat perbatasan. Khususnya di wilayah Entikong, yang merupakan pintu gerbang utama Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, Kasus-kasus *illegal logging* terjadi karena kondisi infra struktur yang lebih baik di wilayah Serawak memungkinkan mereka dapat mengakses hutan-hutan perbatasan dari wilayah Serawak dan segera pergi ketika terjadi razia. Kondisi pembangunan yang lebih maju

dan fasilitas umum yang lebih lengkap di Serawak membuat penduduk lebih sering dan lebih mudah memanfaatkan fasilitas hidup di Serawak. Penduduk Kalimantan Barat lebih mudah memanfaatkan jalan, pasar, rumah sakit, sekolah di Serawak dibandingkan jika mereka harus pergi ke Pontianak.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Amamat Pasal 33 UUD “45**

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas terhadap kegiatan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sehingga tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih baik. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan. Untuk itu penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berkaitan erat dengan hal tersebut, maka penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang tidak dapat ditunda, harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, dan merupakan komitmen nasional yang harus dilakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas pelaku, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 33 UUD’45 memberikan ketentuan-ketentuan imperative bagi Negara untuk mengatur perekonomian. Ayat 1, menyatakan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Perkataannya adalah “perekonomian disusun” tentu artinya tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri secara

bebas (oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” artinya berdasar suatu *mutualisme* yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh *self-interest*. Sedang “azas kekeluargaan” artinya adalah *brotherhood* yang bukan *kinship nepotistic*, sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*.

Ayat 2 pasal 33 UUD ‘45 menyatakan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara “. Penting bagi Negara diinterpretasikan sebagai tanggung jawab Negara, yaitu untuk “melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Disisi lain penting bagi Negara yang dimaksudkan adalah cabang-cabang produksi strategis.

Ayat 3 pasal 33 UUD ‘45, menyatakan bahwa “bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, menegaskan berlakunya Daulat Rakyat dan posisi rakyat yang substansial (utama), disini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa “kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan orang-seorang”.

Dalam penjelasan pasal 33 UUD‘45, bahwa koperasi merupakan “wadah” (ekonomi rakyat, artinya usaha-usaha ekonomi rakyat dihimpun di dalam koperasi untuk bekerja sama dalam suatu “usaha bersama atas azas kekeluargaan”. Koperasi secara prinsip “menolong diri sendiri secara bersama-sama”.Perbedaan antara



badan usaha koperasi dengan badan usaha swasta (korporasi), adalah bahwa pada badan usaha koperasi pemilik adalah sekaligus pelanggan, sedangkan dalam usaha swasta pihak pemilik adalah para pemegang saham dan pelanggan adalah konsumen (*customers*). Di seluruh dunia koperasi telah berkembang maju dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Negara, namun di Indonesia belum seperti yang diharapkan (Swasono, 2011).

## **2. Empowering**

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini mempunyai cakupan yang semakin luas, tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), namun belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan, atau disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*".

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk, 1995 dalam Kartasasmita, 1996, bahwa hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di

lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai reaksi atas, pertama, proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; kedua, pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; ke-tiga, kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi; dan ke-empat, pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996).

Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*). Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut

dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di perdesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa



apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertamanya haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 1996).

*Transfer of knowledge* untuk menciptakan *people empowered* (rakyat/generasi muda berdaya) sehingga secara berangsur terjadi penguatan ekonomi, berdampak pada penguatan Ketahanan Nasional. Posisi rakyat adalah “sentral-substansial” bukan “marginal-residual”. Posisi rakyat ini harus dapat melahirkan prinsip keterbawasertaan. Demokrasi ekonomi Indonesia menuntut partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Dalam setiap kemajuan

pembangunan, rakyat harus secara otomatis terbawa serta ikut maju, atau bahkan harus didorong maju, rakyat harus kita *empowered*, agar tidak menjadi beban pembangunan, yang harus kita transformasi menjadi asset pembangunan (Amartya Sen dalam Swasono, 2011). Beliau melihat pembangunan dari segi *human empowerment* dan mendefinisikan bahwa pembangunan sebagai *expansion of people's capabilities*. Pembangunan ternyata telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.

### **3. Amanat Pasal 33 UUD '45 Dalam Kerangka Konsep kehidupan Nasional RI**

Kemerdekaan Indonesia berlandaskan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan sebagaimana tercermin secara jelas dalam Pancasila. Doktrin Kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang menyertainya. Nasionalisme menegaskan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Sedangkan Doktrin Kerakyatan berkaitan dengan keutamaan daulat rakyat, kepentingan rakyat adalah primus, pemerintahan negara dijalankan atas kehendak rakyat dan kepentingan rakyat, bahwa tahta adalah untuk rakyat Swasono, 2011).

Dalam mencapai upaya tersebut, dituangkan dalam UUD '45 sebagai landasan konstitusi Negara, yang memberikan pedoman dalam penyatuan pandangan atau sebagai pemersatu visi dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang teritegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional

dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Gagasan Ketahanan Nasional berdasar SK Menhankam/Pangab No. Skep/1382/XII/1974).

Ketahanan Nasional diperlukan bukan hanya sebagai konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti *law and order*, *welfare and prosperity*, *defence and security*, *juridical justice and social justice*, *freedom of the people*. Dalam pengaturan dan penyelenggaraan Negara (kehidupan nasional), masalah keamanan dan kesejahteraan ibarat sebuah koin. Satu sisi merupakan gambaran kesejahteraan, sisi yang lain adalah gambaran keamanan. Bidang ekonomi tidak bisa lepas dari faktor-faktor lain yang berkaitan. Perekonomian selain berkaitan dengan wilayah geografi suatu Negara, juga berkait dengan sumber kekayaan alam, sumberdaya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai-nilai social budaya, serta pertahanan dan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya roda kegiatan ekonomi suatu bangsa.

Ketahanan Nasional merupakan integrasi dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan nasional. Karena keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka ketahanan nasional juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Oleh karenanya Ketahanan Nasional bersifat dinamis. Selanjutnya untuk mewujudkan Ketahanan Nasional harus melalui politik dan



strategi nasional sebagai landasan operasional, yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Model yang dikembangkan Lemhannas merinci seluruh aspek kehidupan nasional menjadi ASTA GATRA atau delapan aspek kehidupan nasional yang terdiri TRI GATRA atau tiga aspek alamiah dan PANCA GATRA atau lima aspek sosial. Tri Gatra meliputi letak dan kedudukan geografi; Gatra keadaan dan kekayaan alam; Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Panca Gatra terdiri dari Gatra Ideologi; Gatra Politik; Gatra Ekonomi; Gatra Sosial Budaya dan Gatra Pertahanan Keamanan. Dimana kedelapan aspek ini merupakan satu kesatuan yang bersifat gestalt, terdapat hubungan timbal balik yang erat (korelasi) dan ketergantungan (*interdependency*), tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral).

Aspek kehidupan nasional/Gatra Ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi permintaan, penawaran, produksi, distribusi dan konsumsi barang/jasa beserta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya disamping alat pemuas kebutuhan yang terbatas.. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu Negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian Negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni mempunyai corak yang lain dibandingkan dengan sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah. Perekonomian Indonesia menurut pasal 33 UUD1945 diamanatkan sebagai usaha bersama. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian. Dengan kondisi

yang demikian ini secara makro sistim perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistim perekonomian kerakyatan.

Selain itu bahwa bagi kegiatan ekonomi yang strategis, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola oleh BUMN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( termasuk rakyat yang berada di pulau-pulau terpencil, di pedalaman, di gunung, maupun di hamparan hutan). Rakyat secara berkelompok menjalankan cara pemenuhan kebutuhan melalui Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia sedangkan BUMS bergerak di ruang sela kegiatan ekonomi yang tidak ditangani BUMN dan Koperasi.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemampuan rakyat. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, maka sistim perekonomian Indonesia harus mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

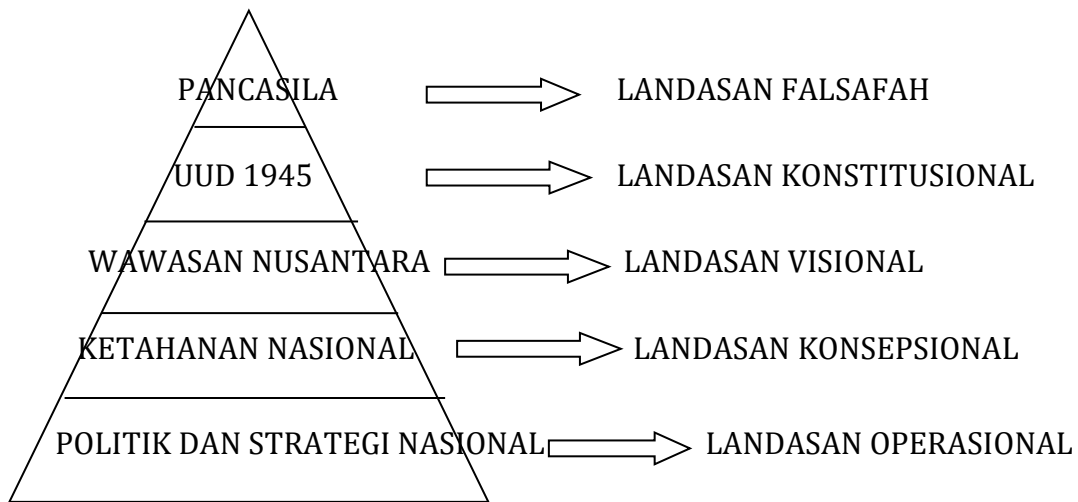
Strategi dalam Sistim Perekonomian Kerakyatan:

- a. Menghindari sistim *free fight liberalism* yang menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.

- b. Menghindari sistem etatisme yang mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor Negara.
- c. Menghindari monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- d. Memantapkan Struktur Ekonomi secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian dan jasa.
- e. Melaksanakan Pembangunan Ekonomi sebagai usaha bersama dibawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.
- f. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah.
- g. Menumbuhkan Kemampuan Bersaing secara sehat.

Secara hirarkis alur konseptual kehidupan nasional Indonesia, tergambar pada bagan 1, sebagai berikut:

**KERANGKA KONSEP KEHIDUPAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**Bagan 1: Model Konseptual Kehidupan Nasional RI**



### **C. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif dilakukan melalui metode *indepth-interview* (wawancara) dan *focus group discussion* dan untuk memperoleh masukan lebih terperinci mengenai perilaku masyarakat perbatasan Entikong, dengan para tokoh masyarakat setempat yaitu Kelapa Dusun (Kadus), Kepala Sekolah dan Guru-Guru Sekolah Dasar (SDN 3 Sontas, Enthikong), Ketua Pemuda, Ibu-Ibu PKK, dan Tokoh Informal.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Kondisi Demografi Wilayah Entikong**

Desa Entikong merupakan ibukota kecamatan Entikong, sebagian berbatas hutan dan sebagian besarnya merupakan kawasan perkotaan. Dalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 26/2008, Entikong merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang pada lima tahun pertama (2008–2013) diprogramkan Revitalisasi dan Percepatan serta Pengembangan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Entikong yakni: Sarana irigasi tadah hujan; Input dan sarana produksi didatangkan dari Serawak Malaysia; Teknik budidaya sederhana; Produktivitas rendah, dan Pemasaran ke Serawak melalui pos tidak resmi (BNPP.go.id).

Kecamatan Entikong adalah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau yang merupakan bagian terdepan berbatasan dengan Malaysia. Ada lima desa di Kecamatan Entikong yaitu: Entikong; Nekan; Pala Pasang; Semanget dan Suruh Tembawang. Luas wilayah kecamatan Entikong 506,89 Km<sup>2</sup>. Jumlah

penduduk Entikong sebanyak 6.587 orang atau 1.445 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri atas 3.458 pria dan sejumlah 3.129 wanita.

Penduduk Entikong sebagian besar terdiri dari suku Dayak, Melayu, Jawa, Batak, Padang, dengan kepadatan : 26/km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk beragama Katholik, selebihnya Kristen Protestan; Islam dan Kong Hu Chu. Dari jumlah tersebut yang tidak tamat SD ada 1.070 orang, lulus SD ada sejumlah 1.418 orang, tamat SLTP sejumlah 1.396 orang, yang lulus SLTA ada sejumlah 268 orang, dan yang lulus diploma ada sejumlah 14 orang, yang mampu lulus Stata 1 (S<sub>1</sub>) ada sejumlah 25 orang dan yang mampu menyelesaikan studi S<sub>2</sub> ada sebanyak 4 orang. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat yang telah mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya SLTA mereka banyak yang bekerja di Malaysia (BPS Maret 2012).

Mata pencaharian masyarakat Entikong sebagian besar petani lada dan karet, untuk menggarap lahan mereka harus pergi ke hutan samapi seminggu dua minggu, jika masih mempunyai anak balita, istri dan anak ditinggal di rumah. Namun jika anak-anak telah menginjak remaja, suami istri pergi ke hutang. Ternak yang dimiliki yaitu babi.

## **2. Perilaku masyarakat Perbatasan (Entikong)**

Kegiatan sehari-hari seluruh keluarga Entikong mulai kegiatan harian di rumah, di ladang sejak musim tanam sampai dengan musim panen. Anak-anak usia sekolah melakukan kegiatan belajar. Anak-anak remaja/dewasa yang sudah tidak sekolah membantu mencari nafkah (di ladang/hutan atau jadi TKI di

Malaysia). Orang tua ke ladang/hutan yang jarak tempuhnya kadang sampai setengah hari perjalanan dengan sepeda motor. Berangkat ke ladang pada dini hari dan pulang petang bila ladangnya dekat, tapi kalau jauh maka bisa sampai seminggu baru pulang. Perempuan ibu rumah tangga yang masih punya anak balita apalagi yang masih memberi susu badan (istilah ASI disana) tinggal di rumah. Ada sebagian kecil yang di rumah sambil membuat anyaman tas dari rotan (itupun bila ada pesanan) dan ada yang membuat jajanan yang dijual dititipkan anak SD. Para pria berburu ke hutan berangkat pada menjelang tengah malam hari dan pulang pagi membawa hasil buruan (babi, pelanduk/kancil dll).

Arus wisatawan dan kemanfaatan perkebunan sampai saat ini bergerak dari Entikong ke Tebedu (Malaysia). Diharapkan kelak sebaliknya, orang dari Tebedu yang datang ke Entikong setelah kita mengelola potensi yang bisa dikembangkan antara lain: wisata alam; wisata hutan; outbond; kebun buah (durian dan cempedak); kebun binatang.

Kelangkaan guru yang mau bertugas di daerah terpencil menyebabkan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di perbatasan Entikong pada tahun 1976 dulu juga merangkap sebagai guru yang tidak dibayar, kalau tidak dibantu, kewalahan karena walaupun SD Cuma satu tapi yang belajar baca tulis dan sebagainya tidak hanya anak-anak melainkan semua warga” kata Paimin, Kepala Sekolah SD Entikong, asal Jawa yang tugas sebagai guru SD sejak th 1976. Lebih lanjut ia menyampaikan :

“warga sangat antusias belajar, itu yang membuat saya semangat, dulu susah. Delapan bulan pertama tidak terima gaji, makan dan segala

kebutuhan dicukupi warga masyarakat Entikong, bahkan sampai nikah yang mencarikan jodoh dan menyelenggarakan perhelatan, semua oleh warga. Kami berjarak lebih dekat dengan Malaysia, siaran Televisi Malaysia bisa diterima dengan antena biasa, sedangkan bila ingin mendapatkan Siaran Televisi Indonesia harus menggunakan antena parabola yang bagus, tapi kalau radio RRI sangat jelas dapat kami tangkap siarannya .

Di Entikong banyak pembangunan yang mengacu pada program nasional, sehingga tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, di Entikong dibangun Rumah Susun (Rusunawa) empat lantai sejak tahun 2006 dengan biaya Rp 10.510.564.000. Namun baru mendapatkan aliran listrik pada tgl 21 Juni 2011. Contoh lain pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kurang dimanfaatkan.

Selain hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak segera tanggap terhadap aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah Malaysia pada masyarakat perbatasan, misalnya ketika ada ratusan sopir demo di Border Entikong, menolak berlakunya aturan pelarangan mobil-mobil Indonesia membeli dan mengangkut barang langsung dari Malaysia ke daerahnya. Sebelumnya, mobil-mobil langsung ke Malaysia, tetapi sekarang hanya boleh mengambil barang melalui gudang yang disiapkan (Land Port) demikian tutur HR Thalib ketua Asosiasi Pengusaha Pedagang Perbatasan Indonesia (AP3I) Kalimantan Barat. Selama ini mereka punya ijin trayek untuk masuk wilayah Malaysia. (Tribun Pontianak.co.id)

Selain itu, ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola distribusi sembako menjadi salah satu sebab terjadinya perdagangan ilegal. Seperti yang dituturkan oleh Kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat Yusuf Indarto Kamis 18 Oktober 2012:

“Jajarannya dituduh sebagai biang keladi masalah gula perbatasan. Padahal gula Malaysia yang masuk ke kawasan perbatasan karena menggunakan Kartu Lintas Batas yang diatur dalam perjanjian perdagangan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1970. Dalam perjanjian tersebut, masyarakat diperbolehkan belanja ke Serawak 600 Ringgit Malaysia (RM) per bulan. Kewenangan kantor Bea Cukai yaitu mengawasi jumlah tidak boleh belanja lebih dari 600 RM di ring satu, setelah itu menjadi kewenangan penegak hukum. Gula Malaysia masuk terus ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan sebagian merembes ke luar wilayah ring satu perbatasan dikarenakan gula Malaysia lebih murah daripada gula impor dari Thailand. Lebih mudahnya gula Malaysia disebabkan karena adanya subsidi dari Kerajaan Malaysia dan tidak dikenai Bea masuk yang besarnya 1500 rupiah per kilogram. Ini pula yang menyebabkan gula impor Thailand sulit terserap di pasar pada lima kabupaten di perbatasan Kalimantan Barat – Serawak. Harga Gula Thailand 10.000 rupiah per kilogram, harga Gula Malaysia 8500 rupiah, ini lebih murah daripada Gula dari Jawa 13000 rupiah per kilogram di perbatasan”.

Demikian juga ketika Pertamina mengecewakan, Entikong membangun SPBU Petronas ( kompas.com 12 Oktober 2011). Harga Solar dan Premium eceran di Entikong mencapai 8000 rupiah per liter yang berarti hampir dua kali lipat harga di Jawa. Penjualan produk Indonesia melalui pos tidak resmi. Pos Lintas Batas (PLB) sejak 1991 belum dijadikan Pelabuhan Ekspor-impor padahal penting bagi perekonomian Sanggau dan Kalimantan Barat. Devisa yang di dapat dari PLB bisa mencapai 34 Milyar dan Bea masuk lebih dari 12 Milyar. Namun dengan terbitnya Permendag No. 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, ternyata Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong tidak termasuk di dalamnya. Hal ini mempengaruhi posisi Entikong di kalangan pengusaha, sehingga penerimaan Negara dari PPLB Entikong kini turun hingga rata-rata 30 persen dari sebelumnya (Sudin, 2012).

Selanjutnya dikatakan VISI Sanggau , BANGKIT DAN TERDEPAN, karenanya sangat dibutuhkan pelabuhan darat (*In Land Port*). Untuk ini Pemerintah sedang mengkaji pembangunan pelabuhan darat Bandar Entikong Jaya di Kecamatan



Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kajian dimulai pada tahun 2011 kata Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, termasuk dalam kajian ialah Energi Listrik dan Potensi Sosial. ((BNPP, Mulyana, 2011).

Rencana pembangunan Bandar Entikong Jaya (BEJ). Melibatkan Mabes POLRI, Menhan RI, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Serawak Chamber of Commerce perwakilan dari Malaysia. Selain itu Permendag No. 57/M-DAG/PER/12/2010 yang tidak menyertakan Entikong, *Border Trade Agreement* juga kurang jelas, sehingga mempengaruhi lalu lintas barang illegal. Sebagaimana diberitakan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Entikong awal tahun 2011 telah menggagalkan aksi penyelundupan 20 unit Laptop Toshiba dari Malaysia ( 31 Januari 2011) lebih kurang pukul 11 oleh warga Malaysia yang kemudian melarikan diri dengan mobil Proton ke wilayah Indonesia (Tribun Pontianak).

Sebetulnya Entikong mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan dari keindahan dan kekayaan alamnya. Di Entikong terdapat wisata Air Terjun Pancur Aji di daerah Bunut, sekitar 30 menit dengan kendaraan roda dua/empat dari kota Kabupaten Sanggau. Selain itu dapat dikembangkan wisata alam yang lain misalnya Wisata Hutan; Out Bond; Kebun Binatang; Kebun Buah; Wisata Air menyusur sungai dan pasar terapung (*Floating Market*) dan atraksi budaya dayak yang memukau.

Dari berbagai perlakuan oleh pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan khususnya Entikong, tidak sejalan dengan rencana proses pemberdayaan masyarakat yang pada awalnya diarahkan pada pengembangan

sumberdaya manusia (di perdesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun kenyataannya justru menyingkirkan dan dan membuat masyarakat tidak berdaya.

Keberadaan UMKM diharapkan menjadi satu pilar terdepan dari Pemerintah Daerah Perbatasan jika PLB dibenahi aturannya maka arus penjualan dari UMKM bisa meningkat. Pemerintah Daerah terus melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan melalui pendekatan KUMKM. Ada anggapan bahwa pembangunan masyarakat kawasan perbatasan terbelenggu dan sulit jika infra struktur tidak disiapkan dahulu. Tetapi jika ada pemberdayaan UMKM ekonomi masyarakat , maka diharapkan UMKM bisa berkembang dan maju sehingga timbul efek ganda yang mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk segera membangun infra struktur. Untuk kelembagaan petani, peternak dan pedagang, perlu diperkuat mulai dari pemberdayaan kelompok sampai dengan pembentukan kelembagaan bisnis/ koperasi.

Upaya memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi dan produk daerah. Sumber pendapatan terbesar dari Pertanian yaitu 92,77% dari Karet; Kelapa Sawit; Padi; Industri Kecil (makanan, anyaman dan kayu). Karet dan Kelapa Sawit menjadi andalan untuk maju. Ada keuntungan letak berbatasan dengan Negara lain yaitu dimana terbukanya prospek bagi masyarakat untuk dapat melebarkan usahanya ke Negara tetangga. Kedekatan geografis dengan Malaysia

dapat memudahkan pengembangan potensi ekonomi terkait dengan pruduk potensial untuk dikembangkan KUMKM dalam suatu kawasan (desa/kecamatan) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia setempat.

Produk diharapkan berdaya saing; berorientasi pasar dan rmah lingkungan sehingga produk mempunyai keunggulan kompetitif dan bisa bersaing di pasar global. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan deskripsi produk potensial di daerah sentra produknya. Entikong sebagai pintu gerbang lintas batas utama dengan negeri jiran, bisa bangkit.

Salah satu kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang terdapat di Bumi Daranante (istilah/nama untuk Kabupaten Sanggau) yaitu: Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang sudah mulai tahun 2007 sampai kini. P2DTK ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pembangunan Partisipatif, memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Partisipatif terutama bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Program P2DTK diarahkan untuk melembagakan pelaksanaan Pembangunan Partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan social dasar (pendidikan dan kesehatan); infra struktur; penguatan hukum; *capacity building* serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha; memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan (meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana social ekonomi.

Percepatan pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Sanggau di dasarkan atas rencana aksi terpadu yang berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah strategis; optimalisasi solusi wilayah serta berbasis kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Tata Ruang Kawasan Perbatasan. Perlu adanya sinergitas Program Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan antara Pusat dan Daerah, karena semuanya memiliki kepentingan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah perbatasan Kabupaten Sanggau. Daranante dengan 200 ribu jiwa penduduknya menghadapi masalah Ketenaga kerjaan; Tenaga Kerja Indonesia; Tingkat pengangguran dan Pembangunan Tata Ruang dan infra struktur.

Upaya memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi dan produk daerah. Sumber pendapatan terbesar dari Pertanian yaitu 92,77% dari Karet; Kelapa Sawit; Padi; Industri Kecil (makanan, anyaman dan kayu). Karet dan Kelapa Sawit menjadi andalan untuk maju. Ada keuntungan letak berbatasan dengan Negara lain yaitu dimana terbukanya prospek bagi masyarakat untuk dapat melebarkan usahanya ke Negara tetangga. Kedekatan geografis dengan Malaysia dapat memudahkan pengembangan potensi ekonomi terkait dengan pruduk potensial untuk dikembangkan KUMKM dalam suatu kawasan (desa/kecamatan) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia setempat.

Produk diharapkan berdaya saing; berorientasi pasar dan rmah lingkungan sehingga produk mempunyai keunggulan kompetitif dan bisa bersaing di pasar global. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi dan deskripsi produk potensial di daerah sentra produknya. Sesuai amanat misi Sanggau poin ke 8:

Pengembangan usaha mikro produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuangan masyarakat, memperkuat usaha produktif secara partisipatif, dengan meningkatkan peran serta pelaku ekonomi mikro dalam pembangunan daerah.

Poin ke 11 Misi Sanggau: Percepatan Pembangunan Wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal. Dengan mensinergikan berbagai program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Ada WNI yang tinggal di perbatasan, khususnya warga yang berasal dari Dusun Gun Jemak, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang lebih memilih berpindah jadi WN Malaysia. Jumlah penduduk perbatasan di wilayah Indonesia yang berpindah jadi WN Malaysia, terdata secara berangsur-angsur sejak 1980 – 2011 mencapai 61 jiwa kata kepala desa Suruh Tembawang Imran Manuk di Pontianak pada 26 Januari 2011. Desa Suruh Tembawang memiliki 6 Dusun dengan jumlah penduduk 2.795 Jiwa (3 Dusun yang belum terdata jumlah penduduk yang pindah kewarganegaraan Malaysia). Alasannya kadang mereka masih bersaudara (Djoko Suyanto MENKOPOLHUKAM). Gubernur Kalimantan Barat Cornelis telah menggratiskan KTP dan Kartu Keluarga. Mengatakan bahwa mereka pindah untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Panglima Kodam XII Tanjungpura Mayor Jenderal Geerhan Lantara mengatakan bahwa masyarakat menyatakan NKRI harga mati, mereka hanya mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan dan minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. (Sumber : Google: Era Baru News, Oktober 2011.)



## E. Penutup

Kemerdekaan Indonesia berlandaskan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan sebagaimana tercermin secara jelas dalam Pancasila. Doktrin Kebangsaan berkaitan dengan ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang menyertainya.

Masyarakat perbatasan sebagai etalase suatu Negara, untuk itu harus lebih memperoleh perhatian, sebagai wujud ketahanan ekonomi. Dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi wilayah yang daya saing tinggi melalui peningkatan kemampuan rakyat (empowering). Strategi yang perlu dikembangkan dalam sistim perekonomian Kerakyatan, antara lain, pertama, menghindari monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, dengan membentuk kelompok bisnis diharapkan masyarakat petani mempunyai bargaining power. Atau melaksanakan Pembangunan Ekonomi sebagai usaha bersama dibawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah, dengan mengutamakan potensi local (*local wisdom*).

Generasi ke generasi akan terus berputar, jika tidak segera ditangani secara sungguh-sungguh, Negara kita akan semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Terbukti mulai berangsur warga Entikong beralih menjadi warga Negara Malaysia. Mumpung saat ini masih ada generasi yang peduli terhadap NKRI seperti pernyataan Tokoh Masyarakat):

“...Diibaratkan andai, badan ini dibelah, walau Perut Malaysia, Hati Indonesia...dan kami yakin dengan pendidikan, pasti masyarakat kami akan bisa mengerjakan apa saja....orang pintar bisa melakukan apa saja...”

Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas dari keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah dari ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas. Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normative, coraknya ditentukan oleh ideology , politik Negara dan paham kemasyarakatan. Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa, undang-undang negeri, organisasi yuridis dan sosial serta adat-istiadat yang berlaku, cita-cita kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan moral dan moral bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi tidak terlepas dari pandangan hidup. Telah menjadi consensus nasional kita bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia yang bersifat permanen dan tidak bisa ditawar. Maka keseluruhan semangat , arah dan gerak pembangunan nasional harus dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila.

Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, maka sistem perekonomian Indonesia harus mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan

UUD1945. Potensi local jangan diabaikan, sehingga pembangunan nasional mampu menggosok kemiskinan bukan menggosok orang miskin, sehingga masyarakat berdaya.

## **Daftar Pustaka**

Data Kemiskinan Enthikong, 2011, Balai Pusat Statistik

Effendi, Irhas; Purbudi W, Dyah Sugandini. 2009. Evaluasi KEefektifan Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD) Perdesaan Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul DIY. Proses publikasi.

Kartikasari, wahyu. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah-wilayah Perbatasan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

------. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Trafficking di Wilayah Perbatasan KalBar-Serawak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

LEMHANNAS, 1997. KETAHANAN NASIONAL. Balai Pustaka-LEMHANNAS, Jakarta.

Mubyarto, 2001, *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta

Peta Wilayah Enthikong, 2012, Balai Pusat Statistik

Sutisna, Sobar dan Widodo, Kusumo. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Graha Ilmu, Yogyakarta*.

Swasono, Sri Edi. 2011. Menolak Neoliberalisme: Kembali Ke Ekonomi Konstitusi. Seminar Nasional Kebijakan Ekonomi Pancasila.

Sudin, Setiman H, 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah Tingkat II, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

## **UUD 1945**

Warsito, Tulus. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas: Isue dan Permasalahan Perbatasan: Perbatasan Kalbar- Serawak Dlm Perspektif Buruh Migran Ind*. Graha Ilmu, Yk.

# PEOPLE\_EMPOWERING\_SEBAGAI\_STRATEGI\_MEMBANGU..

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[e-journal.uajy.ac.id](http://e-journal.uajy.ac.id)

Internet Source

9%

2

[anekamakalahkita.blogspot.com](http://anekamakalahkita.blogspot.com)

Internet Source

3%

3

[pse.litbang.pertanian.go.id](http://pse.litbang.pertanian.go.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On